

BADAN AKREDITASI NASIONAL INDUSTRI KONSTRUKSI SUATU KEBUTUHAN

M. Agung Wibowo¹, Joetata Hadihardaja¹

Diterima 16 Juni 2006

ABSTRACT

The construction industry has a significant role to the contribution of the development both in developed and developing countries. The importance of the industry is not only in its product but also in the scale of the industry, its share in the national economy and how it affects society. Moreover, construction products, such as roads, bridges, railways, irrigation, schools, hospitals, dwellings, offices and factories are an important element in the economy and in improving living standards. An important issue of the construction industry in developing countries is to improve the quality of the industry due regard to social, environment and sustainability aspect. One of the alternative solution is to develop a Construction Industry Development Board (CIDB). However, the detailed way in which all of aspects in the CIDB interact is not well understood. This paper presents a possible system of CIDB model by using a prototype model from National Accreditation Body of Higher Education System.

Keywords : *Construction industry development, government, CIDB.*

ABSTRAK

Industri konstruksi mempunyai peran yang penting dalam proses pembangunan ekonomi suatu negara baik di negara berkembang maupun negara maju. Peran penting industri konstruksi dapat dilihat dari produk yang dihasilkan seperti jalan, jembatan, irigasi, waduk, gedung dan terminal bus ataupun pesawat terbang. Industri konstruksi tidak hanya dilihat dari produk yang dihasilkan namun juga dalam prosesnya berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, dalam hal penciptaan lapangan kerja. Kualitas industri konstruksi dalam hal interaksinya dengan isu sosial, lingkungan dan keberlanjutan dalam proses pembangunan ekonomi merupakan hal mendasar yang harus dipikirkan bagi industri konstruksi, khususnya di negara berkembang. Studi ini mengkaji model dan pola Badan Akreditasi Nasional sebagai salah satu acuan yang dapat diterapkan dalam menjalankan Lembaga Pembinaan Konstruksi di Indonesia

Kata kunci : *Industri Konstruksi, pemerintah, Lembaga Pembinaan Konstruksi*

¹ Jurusan Teknik Sipil FT. Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto SH. Tembalang, Semarang
Email : magw@sipil.ft.undip.ac.id

LATAR BELAKANG

Bangsa Indonesia sudah memasuki era persaingan global dimana dalam hal ini dengan ikut sertanya Indonesia meratifikasi WTO. Hal ini secara langsung maupun tidak, semua sektor industri yang ada perlu mulai mengkaji ulang daya saing industrinya, dalam hal ini tidak terkecuali industri konstruksi. Daya saing itu sendiri secara tidak langsung menyangkut kompetensi dan profesionalitas.

Persaingan semakin ketat dan terbuka untuk pelaku industri konstruksi. Liberalisasi global mempunyai makna bahwa adanya kesamaan dan kesetaraan perlakuan antar pelaku usaha di pasar dunia baik bagi pelaku lokal atau nasional maupun luar negeri. Keunggulan dan keunikan yang dikemas menjadi kekuatan menjadi salah satu faktor yang penting untuk tetap eksis dalam persaingan global. Secara umum, terdapat dua macam keunggulan dalam persaingan, yaitu keunggulan komparatif yang mana lebih menekankan pada kepemilikan sumber daya atau *resources* (*endowment factor*) dan keunggulan kompetitif dimana lebih menekankan pada aplikasi manajemen dan teknologi yang tepat dan efisien.

Tahun 2003 merupakan awal bangsa Indonesia memasuki pasar perdagangan bebas sebagaimana konsekuensi bagi suatu bangsa yang telah ikut meratifikasi untuk ikut dalam berperan dalam kompetisi pasar bebas. Kesepakatan kerjasama ekonomi dalam konteks GATT, APEC dan AFTA memungkinkan masuknya perusahaan konstruksi dari manca negara untuk ikut berkompetisi dalam memp-

rebutkan market share pembangunan konstruksi di Indonesia. International construction market atau global market size konstruksi adalah US \$ 3.200 Billion (Suraji 2004 ct Mawhiney, 2001). Selanjutnya prospek atau trend untuk construction market di kawasa Asia adalah (Suraji 2004 ct International Symposium Construction – Bangkok, 2004):

Table 1 menunjukkan bahwa sampai tahun 2010, Indonesia memiliki market terbesar ketiga se Asia. Hal ini secara tidak langsung merupakan peringatan bagi industri nasioanal konstruksi untuk dapat secara strategik menyiapkan pranata yang ada, supaya market yang ada tetap dapat di kuasai oleh pengusaha konstruksi nasioanal.

Table 1. Size of Construction Market by 2010 (Singapore ERC Report, 2003)

Country	Size of Construction Market by 2010 (S'pore ERC Report,2003)
China	US \$ 1.2 trillion
India	US \$ 114 billion
Indonesia	US \$ 120 billion
Thailand	US \$ 71 billion

Industri konstruksi dapat dikategorikan sebagai salah satu industri yang berperan penting pada proses pembangunan ekonomi suatu negara. Lowe (2003) menyatakan bahwa kontribusi industri konstruksi terhadap total *Gross Domestic Product* (GDP) suatu negara maju lebih kurang 7% hingga 10%. Adapun dinegara yang sedang berkembang, industri konstruksi meng-hasilkan 3% hingga 6% dari total GDP. Industri konstruksi juga

memberikan kontribusi kepada pembukaan lapangan kerja baru serta distribusi pendapatan bagi masyarakat lapisan bawah (Lopes, 1997). Selanjutnya, sektor ini juga mampu memberikan stimulus melalui efek pengganda (multiplier effect) khususnya pembangunan infrastruktur, bagi pengembangan sektor-sektor lainnya. Sebagai contoh di Indonesia, industri konstruksi mampu memberikan kontribusi lebih kurang 4%-8% terhadap total GDP. Adapun fluktuasi dari kontribusi sektor konstruksi dari

tahun 1995 hingga tahun 2002, dapat dilihat pada figure 2.

Figure 1 memperlihatkan bahwa sektor konstruksi mulai mengalami penurunan. Terlihat bahwa semenjak tahun 1996 menunjukkan grafik yang menurun, hingga puncaknya pada saat bangsa Indonesia mengalami krisis ekonomi tahun 1997. Namun, terlihat adanya sedikit recovery yang mana antara tahun 2001 hingga tahun 2002 terlihat trend konstruksi mulai menunjukkan gejala kenaikan.

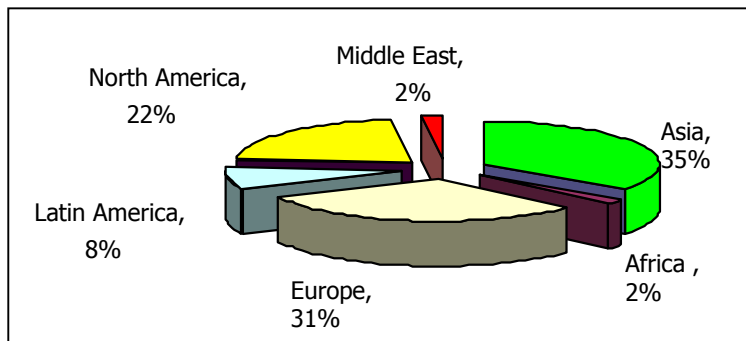


Figure 1. Distribution of global Construction Market shares (Bon and Crosswhite, 2003)

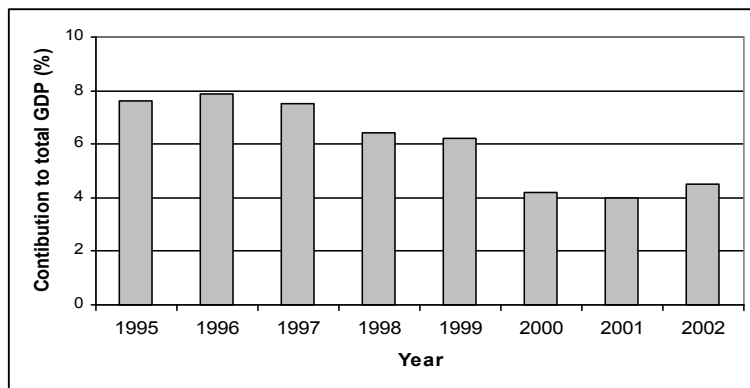


Figure 2. Kontribusi industri konstruksi terhadap total GDP Indonesia (BPS, 2003 diolah)

Secara kuantitatif, industri konstruksi memiliki potensi sangat besar dengan jumlah kurang lebih 100.000 perusahaan besar, menengah dan besar. Jumlah pelaku bisnis yang besar serta adanya perbedaan yang besar antara golongan pengusaha kelas besar, menengah dan kecil, menjadikan sektor konstruksi sebagai industri yang fragmented. Dari sekian banyak pelaku bisnis, hanya beberapa dari mereka yang telah mampu berkompetensi secara global. Hal ini kemungkinan dikarenakan oleh rendahnya aspek profesionalitas serta industri konstruksi masih mempunyai citra yang kurang baik. Citra yang kurang baik ini masih terlihat dalam beberapa indikator, sebagai contoh: citra buruk kolusi dan korupsi, keterlambatan proyek akibat dari birokrasi penyelenggaraan proyek, masih adanya kualitas produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi, serta kurangnya informasi yang akurat mengenai kondisi riil industri konstruksi.

Dalam hal perundang-undangan dan kelembagaan, Undang-Undang Jasa Konstruksi No. 18 Tahun 1999 berikut aturan-aturan di bawahnya belum sepenuhnya dijadikan kerangka acuan dalam penyelenggaraan berbagai aktifitas pada sektor konstruksi. Pengadaan proyek-proyek konstruksi pemerintah melalui Keppres 18 Tahun 2000 dan kemudian diperbaharui menjadi Keppres 80 Tahun 2003 sebagai wahana menuju profesionalitas penyelenggaraan bisnis konstruksi ternyata masih belum optimal. Sementara itu, pemberian peran yang lebih besar kepada masyarakat konstruksi Indonesia oleh negara melalui deskripsi klausul-klausul dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi

telah melahirkan beberapa misinterpretasi. Selanjutnya, misinterpretasi ini mengarah kepada beberapa konflik antar stakeholder dalam upaya perebutan wewenang politik dan ekonomi pada industri konstruksi (Suraji, 2003). Iklim yang lebih terbuka bagi masyarakat untuk berperan, telah memunculkan beberapa kemajemukan dalam pranata kelembagaan. Dalam hal ini munculnya organisasi-organisasi profesi sejenis yang saling berebut dalam kepentingan dan wewenang yang sama (*conflict of interest*). Kondisi dan iklim yang tidak kondusif ini, secara tidak langsung menghambat terwujudnya profesionalitas pada sektor konstruksi, sebagai contoh, beberapa konflik untuk isu-isu sertifikasi yang terjadi pada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), asosiasi profesi dan asosiasi perusahaan.

BEBERAPA ISU TERKAIT PENGEMBANGAN USAHA KONSTRUKSI

Pasar global yang sudah tidak dapat dihindari, citra dari sektor konstruksi yang kurang baik, rendahnya profesionalitas serta belum sepenuhnya pranata kelembagaan dan perundang-undangan berjalan dengan semestinya, menimbulkan beberapa isu yang harus dikaji ulang demi meningkatkan kinerja dari sektor konstruksi. Adapun isu-isu yang perlu untuk ditinjau kembali adalah:

- Perlu evaluasi dan pengkajian ulang terhadap pranata Undang-Undang dan kelembagaan guna menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan sektor konstruksi itu sendiri.

- Se jauh mana upaya meningkatkan kemampuan industri konstruksi nasional untuk menjadi pemain pada tingkat internasional melalui peningkatan kualitas SDI (Sumber Daya Insani)
- Berlakunya UU Jasa Konstruksi yang baru di mana peran masyarakat mendapat akomodasi yang besar, ternyata disamping memberikan efek positif terdapat pula efek negatif yang perlu dikaji lebih dalam.
- Kemungkinan perlunya mendorong peran Pemerintah sebagai fasilitator aktif dalam membina sektor konstruksi.

DISKUSI

Umum

Konstruksi meliputi semua kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan/konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, baik dimanfaatkan untuk tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Hasil kegiatan tersebut antara lain bisa digunakan secara individu atau umum seperti: jalan, gedung, jembatan, rel, dan jembatan kereta api, terowongan, bangunan pembangkit listrik, transmisi, distribusi dan bangunan jaringan komunikasi. Kegiatan konstruksi meliputi perencanaan, persiapan, pembuatan, pembongkaran dan perbaikan bangunan. Proses produksi dari sektor konstruksi membutuhkan input dari sektor lain, sementara itu hasil akhir dari produk sektor ini akan dipergunakan lagi oleh sektor lain baik sebagai customer goods ataupun investment goods (Wibowo, 2004).

Undang-undang dan penataan pranata kelembagaan yang merupakan salah satu faktor penting dalam sektor konstruksi perlu dikaji ulang dan dievaluasi. Sebagai contoh, Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999 dimana memberikan porsi lebih besar kepada masyarakat untuk ikut aktif berpartisipasi dalam pengembangan usaha industri konstruksi. Salah satu implementasinya adalah asosiasi profesi merupakan badan yang berhak memberikan sertifikasi kepada anggotanya.

Pada kenyataannya di lapangan, konsekuensi dari aturan tersebut timbulnya persaingan antara lembaga-lembaga tersebut dalam rangka berebut kewenangan dan ekonomi dalam mengadakan sertifikasi. Terlihat dengan jelas bahwa masing-masing asosiasi-asosiasi tersebut dalam pelaksanaannya dilapangan masih dipengaruhi oleh ego centris masing-masing. Sehingga sering terjadi benturan kepentingan didalam pelaksanaannya.

Hal yang lebih tragis adalah sertifikasi yang telah dikeluarkan oleh lembaga-lembaga asosiasi tersebut ternyata tidak diakui dalam tingkat regional dan internasional. Salah satu upaya yang dapat dikembangkan adalah mencoba menggalang kerjasama dengan lembaga-lembaga sejenis yang ada di manca negara, sehingga diharapkan sertifikasi yang dikeluarkan dapat dipergunakan di tingkat regional bahkan internasional.

Sebagai salah satu bahan acuan untuk mengadakan evaluasi, adalah mencoba meneropong ulang atau mengevaluasi diri, guna disesuaikan dengan perubahan yang terjadi pada

lingkungan makro yang melingkupinya. Figure 3, menggambarkan secara makro skema evaluasi diri yang mana disesuaikan dengan faktor eksternal yang senantiasa berubah dan melingkupinya.

Sumber daya manusia dan sertifikasi baik bagi lembaga maupun professional adalah merupakan aspek perdebatan yang selama ini masih berlangsung. Asosiasi profesi merupakan badan atau lembaga yang berhak mengeluarkan sertifikasi bagi anggotanya. Sehingga beragam asosiasi yang ada, berlomba-lomba mengadakan serifikasi. Tetapi sangat disayangkan, bahwa para asosiasi tersebut amat jarang yang secara bertahap meng-up-grade kompetensinya. Sehingga, sertifikasi

yang telah dikeluarkanpun, ternyata tidak dapat dipakai baik pada level regional maupun internasioanl. Selanjutnya, perlunya meninjau ulang kinerja dari lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses perijinan, akreditasi dan sertifikasi di industri konstruksi.

- Lembaga-lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan perijinan, akreditasi dan sertifikasi hendaknya bekerja sama dengan lembaga-lembaga sejenis dari negara lain, baik secara bilateral dan multilateral.
- Akreditasi bagi tenaga profesional hendaknya dapat berlaku secara internasional.

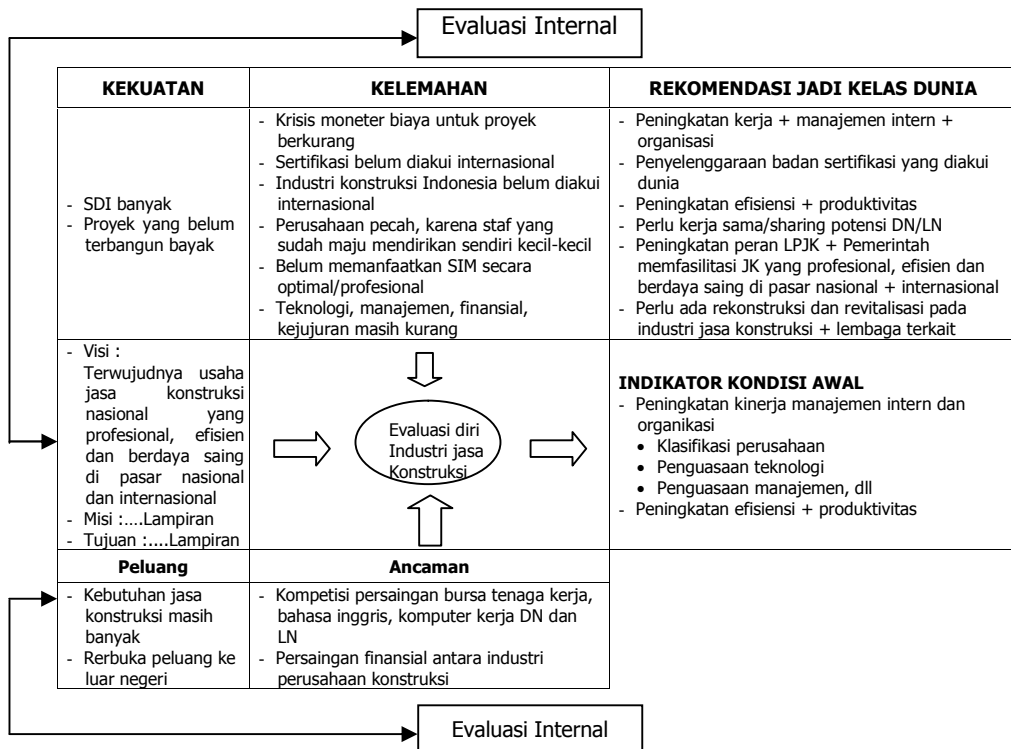


Figure 3. Skema evaluasi diri (Hardihardaja, 2004)

- Adanya standar nasional kriteria atau aturan perijinan bagi pelaku bisnis konstruksi, yang mana dapat diaplikasikan pada tingkat lokal.
- Dapat dimungkinkan penerapan partnering sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan pelaku bisnis konstruksi, sebagai contoh pengusaha-pengusaha kecil bergabung untuk dapat mengerjakan proyek berskala menengah.
- Mendorong pemerintah untuk menjadi fasilitator aktif dalam aspek pendanaan dan penyusunan kriteria akreditasi, perijinan dan sertifikasi.
- Ada sinergi ke arah positif dalam iklim pengembangan industri konstruksi.

Studi Kasus: Badan Akreditasi Nasional (BAN) Perguruan Tinggi

Sistem yang berlaku dalam Badan Akreditasi Nasional (BAN) perguruan tinggi dapat dipakai sebagai salah satu acuan dalam rangka mengakreditasi perusahaan konstruksi ataupun pemberian sertifikasi pada tenaga profesional industri konstruksi. Dalam hal ini, sudah barang tentu terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara industri konstruksi dan industri pendidikan. Namun dalam hal ini pengalaman dan filosofi yang telah diaplikasikan pada proses akreditasi perguruan tinggi tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu bahan acuan bagi industri konstruksi.

Definisi dari Badan Akreditasi Nasional (BAN) adalah merupakan suatu badan yang independen dan mandiri, baik dalam organisasi maupun pendanaan, serta diakui sebagai otoritas nasional dalam bidang akreditasi dan penilaian

mutu perguruan tinggi. Selanjutnya, misi dari BAN itu sendiri ialah: melindungi masyarakat melalui pengendalian mutu pendidikan tinggi dengan menggunakan instrumen akreditasi yang valid, reliabel, disertai rujukan norma akreditasi yang jelas, mudah, dan layak diterapkan kepada semua perguruan tinggi di Indonesia, dan hasil akreditasi dapat dipergunakan sebagai informasi yang terpercaya di masyarakat

Pendirian Majelis BAN-PT pertama kali diangkat oleh menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kepmen Dikbud No. 187/U/1994, tanggal 7–Agustus–1994. Sementara itu, Sekertariat BAN-PT pertama kali beroperasi mulai Agustus–1994, sedangkan proses akreditasi pertama kali dilakukan pada tahun 1996.

Selanjutnya, tujuan dan sasaran dari BAN adalah:

- Melakukan akreditasi terhadap program studi dan institusi perguruan tinggi secara nasional bagi perguruan tinggi negeri, swasta, kedinasan dan keagamaan yang menyelenggarakan program profesional maupun akademik.
- Menyampaikan informasi hasil akreditasi kepada publik pengguna perguruan tinggi atau lulusannya.
- Melakukan akreditasi terhadap program studi dan institusi perguruan tinggi secara nasional bagi perguruan tinggi negeri, swasta, kedinasan dan keagamaan yang menyelenggarakan program profesional maupun akademik.
- Menyampaikan informasi hasil akreditasi kepada publik pengguna perguruan tinggi atau lulusannya.

Aspek-aspek filosofi dasar pada proses akreditasi perguruan tinggi dapat dilihat secara umum pada figure 4. Dapat dilihat bahwa, proses akreditasi

berdasarkan pada proses input-output yang mana lingkungan luar ikut berperan dalam proses tersebut.

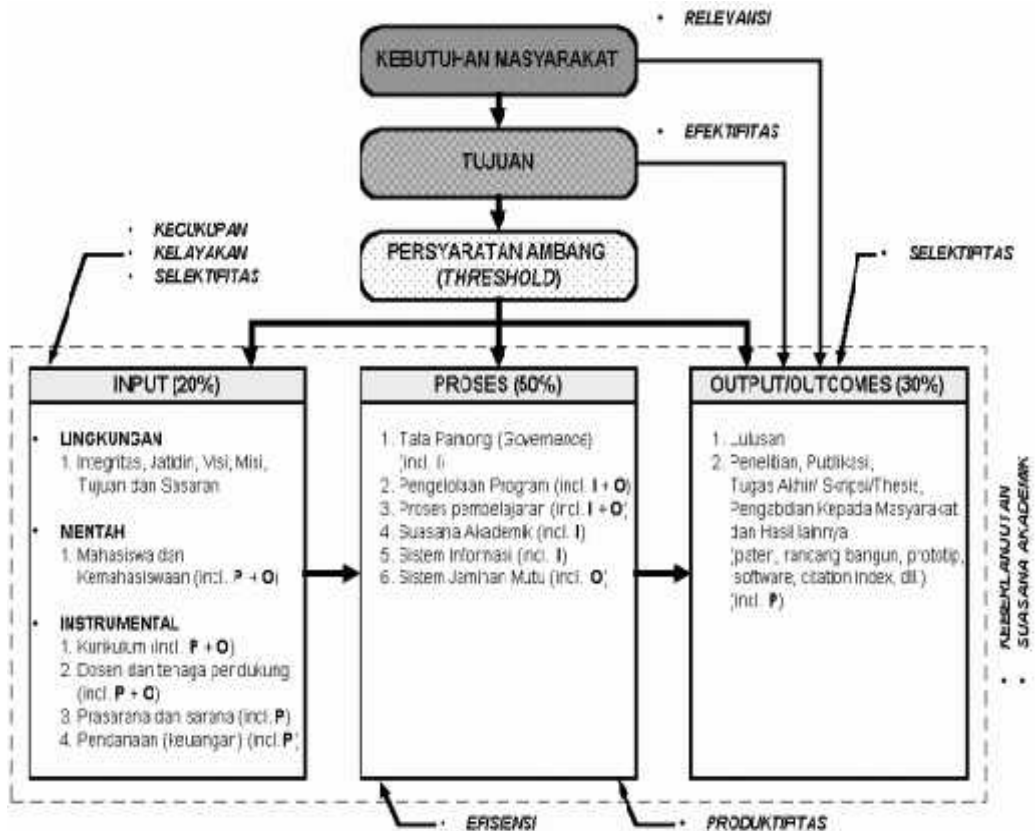


Figure 4: Diagram Filosofi Dasar Badan Akreditasi Perguruan Tinggi



Figure 5. Proses akreditasi dan visitasi perguruan tinggi

Adapun fungsi dari Badan Akreditasi Nasional dapat disebutkan seperti di bawah ini:

1. Mengawasi mutu dan efisiensi pendidikan tinggi melalui proses akreditasi pada semua program studi dalam institusi pendidikan tinggi di Indonesia;
2. Menyebarkan informasi pada publik mengenai status akreditasi dari program studi dalam institusi pendidikan tinggi, sehingga publik dalam meyakini mutu pendidikan yang ditawarkan, dan mutu program-program tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan;

Memberikan saran pembinaan mengenai peningkatan mutu program-program studi.

Evakuasi diri pada proses pembinaan perguruan tinggi merupakan hal yang menempati posisi vital. Hal ini dapat dilihat pada figure 5, dimana evaluasi merupakan hal mendasar dan pertama kali dilakukan sebelum melakukan permohonan akreditasi ke BAN perguruan tinggi.

KESIMPULAN

Persaingan global dunia konstruksi sudah merupakan hal yang tidak dapat dielakkan lagi. Untuk itu industri konstruksi nasional diharapkan dapat melakukan peninjauan dan kajian evaluasi terhadap posisi yang ada sekarang ini. Hal ini seyogyanya disertai tindakan lanjut yang dapat diaplikasikan secara nyata pada setiap kebijakan dan aktifitas di sektor konstruksi.

Undang-Undang Jasa Konstruksi yang mana mengamatkan terhadap masyarakat untuk berperan aktif terhadap pengembangan industri konstruksi hendaknya diimbangi oleh peran pemerintah sebagai pihak fasilitator aktif. Hal ini diperlukan guna menjaga kewibawaan dan independensi untuk mengurangi benturan-benturan konflik yang berkepanjangan diantara asosiasi-asosiasi perusahaan ataupun asosiasi profesional.

Pada makalah ini, sistem Badan Akreditasi Nasional (BAN) Perguruan

Tinggi, dijadikan sebagai salah satu referensi dasar atau umum yang mungkin dapat diterapkan pada sektor konstruksi pada pembentukan lembaga akreditasi dan sertifikasi. Sudah barang tentu hal ini terlepas dari perbedaan karakteristik industri konstruksi dan industri pendidikan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadihardaja, J, Prof. Ir, Proceeding "Membangun Industri Konstruksi Indonesia menjadi Kelas Dunia, Program Doktor Teknik Sipil, Universitas Diponegoro, November 2004.
- Suraji, Ahmad (2004) *Report unpublished on International Symposium*, Bangkok, 17-19 November 2004
- Suraji, Ahmad (2003) *Unpublished reports on Construction Industry*. [Http://www.BAN](http://www.BAN).
- Bon, R and Crosthwaite, D (2000), *The Future of International Construction*, Thomas Telford, London.
- Wibowo, M.A, (2004) *Labour Intensive Construction and Its Effects on a Developing Economy*, Ph D Thesis, Nottingham University.